

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI  
HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA  
PEGAWAI**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN  
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEGAWAI (Studi Kasus  
Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana di Program Studi Akuntansi*

**ZAHRA PRATHAMY**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEGAWAI (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)

NAMA : ZAHRA PRATHAMY

NIM : 20190070066

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 05 September 2023

Penulis,

  
Zahra Prathamy



## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEGAWAI (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)

NAMA : ZAHRA PRATHAMY

NIM : 20190070066

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 28 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 05 September 2023

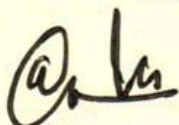
Pembimbing I



M. Zulvan Dwi H, M.Acc

NIDN: 0120210041

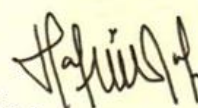
Ketua Penguji



Nur Alim Bahri, M.Ak

NIDN: 0412089502


Pembimbing II



Dania Meida Rosyidah, M. Ak

NIDN: 0422059502

Ketua Program Studi



Heliani, M.Ak

NIDN: 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 041404058705



*Skripsi ini kutujukan kepada:*

*Orang tua dan adik-adik tercinta*

*Keluarga*

*Guru-guru*

*Sahabat*

*Dan seluruh pihak yang telah menjadi saksi perjalanan hidup*

## ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of knowing the effect of Regional Original Income, Profit Sharing Funds, and General Allocation Funds on Personnel Expenditure at the Sukabumi City Government in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with a period of 12 (twelve) budget periods from 2011 -2022. The data used in this study is secondary data originating from the Budget Realization Report (LRA) for the City of Sukabumi in the form of data on the realization of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Personnel Expenditures. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the SPSS 25 program. The results of the study show that partially Own Regional Income and Revenue Sharing Funds do not affect Personnel Expenditure, while the General Allocation Fund has an effect on Personnel Expenditures. Simultaneously Local Own Revenue, Profit Sharing Funds, and General Allocation Funds jointly affect Personnel Expenditures.*

**Keywords:** *Local Own Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, and Personnel Expenditures.*



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kurun waktu 12 (dua belas) periode anggaran dari tahun 2011-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Sukabumi berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Pegawai. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Pegawai.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Pegawai.*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kepada para sahabatnya. Alhamdulillah atas berkah dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)”. Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra.

Penelitian ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, motivasi dan nasehat dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, ST, M.Si, MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak Anggy Pradiftha J., S.Pd, M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Ibu Heliani, SE., M.Ak selaku Kepala Program Studi Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Bapak M. Zulvan Dwi H, M.Acc., dan Ibu Dania Meida Rosyidah, M. Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing kepada peneliti serta telah mengajarkan pentingnya arti kesabaran.
5. Bapak Nur Alim Bahri, M.Ak., dan Bapak Andy Juniarso, M.M., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberi masukan atas keberhasilan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah mendidik, memotivasi dan memberikan ilmunya.



7. Bapak Ust. Irfan Sofiyan, M.Pd., selaku guru dan orang tua pada Pondok Pesantren Mahasiswa Nusa Putra Roudhatul Irfan Sukabumi.
8. Bapak Prof. Mochammad Ramdan, S.H., M.H., selaku guru dan orang tua pada layanan program SISMINRA.
9. Bapak Mulyana Rustiawan, S.E., selaku guru dan orang tua pada layanan program SISMINRA.
10. Bapak Suparman Wiguna, S.E., selaku pembimbing penulis selama studi kasus pada Pemerintah Kota Sukabumi.
11. Bapak Dedy Aryadi dan Ibu Sri Agustiani, ayah dan mamah tercinta penulis, yang tidak pernah bosan dalam mendo'akan, mendidik, memberi dukungan, motivasi serta nasihat kepada penulis.
12. Cempaka Mauretha, Andhika Arya Dharma dan Agastya Ramadhan, selaku adik tersayang yang telah mendo'akan serta menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu kuat dalam menyelesaikan segala tugas dan kewajiban penulis.
13. Keluarga besar tercinta yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Sinta Vina Rahmawati, selaku sahabat penulis sejak tahun 2016 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta memberikan do'a kepada penulis.
15. Ibu Neng Rani Nabawiyah dan Ibu Nurul Islam Hasanah dan seluruh member grup ciwi-ciwi asrama 2019 yang telah kebersamai dan seluruh rekan mahasiswa yang selalu menjadi teman diskusi serta telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan partisipasi kepada penulis dalam menyelesaikan program S1 Akuntansi pada Universitas Nusa Putra.

Sukabumi, 05 September 2023

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahra Prathamy

NIM : 20190070066

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEGAWAI (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

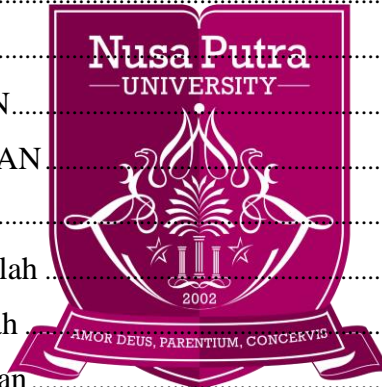
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukabumi, 05 September 2023

  
Zahra Prathamy

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Teori Keagenan.....	15
2.1.1 Belanja Pegawai (Y).....	16
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (X <sub>1</sub> ).....	20
2.1.3 Dana Bagi Hasil (X <sub>2</sub> ).....	22
2.1.4 Dana Alokasi Umum (X <sub>3</sub> ).....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24
2.3. Hipotesis.....	28
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pegawai.....	28



2.3.2	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Pegawai .....	29
2.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai .....	30
2.3.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai .....	31
2.4.	Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>33</b>
3.1.	Metode Penelitian .....	33
3.2.	Populasi dan Sampel .....	33
3.2.1.	Populasi .....	33
3.2.2.	Sampel Penelitian .....	33
3.3.	Definisi dan Operasional Variabel Penelitian .....	34
3.3.1	Definisi Variabel Penelitian .....	34
3.3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	35
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.5.	Metode Analisis .....	37
3.5.1.	Statistik Deskriptif.....	37
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik .....	37
3.5.3.	Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	38
3.5.4.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	39
3.6.	Uji Hipotesis .....	40
3.6.1.	Uji parsial (Uji statistik T) .....	40
3.6.2.	Uji Simultan (Uji Statistik F) .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
4.1.	Gambaran Umum Penelitian .....	42
4.2.	Statistik Deskriptif .....	43
4.3.	Uji Asumsi Klasik .....	45
4.3.1.	Uji Normalitas .....	45
4.3.2.	Uji Multikolinieritas .....	46
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	46
4.3.4.	Uji Autokorelasi .....	47
4.4.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	48
4.5.	Penguujian Hipotesis .....	49



4.5.1. Uji Determinasi .....	49
4.5.2. Uji Parsial T .....	50
4.5.3. Uji Simultan F .....	51
4.6. Pembahasan .....	51
4.6.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pegawai .....	52
4.6.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Pegawai .....	53
4.6.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai .....	54
4.6.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai .....	54
BAB V SIMPULAN .....	56
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	57
5.3 Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	63





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah .....	4
Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022 .....	5
Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022 .....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 PAD, DBH, DAU dan Belanja Pegawai Tahun 2011-2022.....	43
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	46
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi .....	47
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Determinasi .....	49
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial T .....	50
Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan F .....	51
Tabel 4. 11 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global.....	1
Gambar 1. 2 Diagram Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	1
Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	2
Gambar 1. 4 Skala Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi .....	3
Gambar 1. 5 Trend Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.....	9
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2011-2022 .....	64
Lampiran 2 : Tabulasi Data .....	66
Lampiran 3 : Hasil Output SPSS 25 .....	67
Lampiran 4 : Curriculum Vitae .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Berlandaskan informasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi yang bagus. Pada triwulan IV 2022, kemajuan ekonomi Indonesia tercatat dalam keadaan yang meningkat yakni 5,01% (*year on year*) di tengah pertumbuhan ekonomi global yang menurun (Yuwono & RI, 2023).



**Gambar 1. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global**

Sumber: (Yuwono & RI, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi global akan mengalami penyusutan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1. 2 Diagram Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Sumber: (Yuwono & RI, 2023)



**Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Sumber: (Yuwono & RI, 2023)

Menurut Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c) kemampuan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menguat dibandingkan dengan tahun 2021. Kemajuan ekonomi tahunan ini kembali menempati predikat 5% seperti sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung dengan adanya organisasi sektor publik yang mencakup lembaga pemerintah. Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang mengatur segala bentuk kegiatan pemerintah daerah yang di dalam nya memuat rencana pembangunan berjangka.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program wali kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pemerintah Kota Sukabumi memiliki visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Visi yang memuat tujuan wali kota yaitu terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera, serta misi yang mendorong dari visi tersebut yaitu:

- (1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial,
- (2) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,



- (3) Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar,
- (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Sehingga dari visi dan misi nya tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki skala prioritas dalam program pembangunan daerah, seperti:



**Gambar 1. 4 Skala Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi**

Sumber: (Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021, 2021)

RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 juga merupakan instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Upaya untuk mencapai target pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan dan disepakati tentunya melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan.

Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada rancangan awal RKP tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional

untuk tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan tahun 2021. Keberhasilan RPJMD didukung dengan adanya kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018) kemampuan keuangan daerah adalah:

“klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD”.

Kemampuan keuangan daerah merujuk pada suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan, menyediakan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan asset yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Kemampuan daerah menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018) bagi kabupaten/kota ini dibagi menjadi 3 kategori:

**Tabel 1. 1 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah**



Kemampuan Keuangan Daerah		
Tinggi	Sedang	Rendah
>500.000.000.000	300.000.000.000 s.d 550.000.000.000	<300.000.000.000

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018)

Penentuan kategori kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$KKD = \text{Pendapatan Umum Daerah} - \text{Belanja Pegawai}$$

Hal yang termasuk dalam Pendapatan Umum Daerah menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Umum

Sedangkan yang termasuk dalam belanja pegawai adalah:

1. Belanja gaji dan tunjangan
2. Tambahan penghasilan pegawai

Kemampuan daerah ini merupakan salah satu bentuk kemandirian daerah dalam mewujudkan RPJM daerah yang ditinjau dari sisi pengelolaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan ekonomi lokal. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila anggaran yang direalisasikan telah mencapai kriteria suatu daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dari pendapatan dan belanja pada daerah tersebut.

**Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan Daerah
2011	115.351.808.000	407.226.914.000	108.615.835.000	631.194.557.000
2012	148.387.666.000	485.133.119.000	98.988.004.000	732.503.789.000
2013	174.959.121.000	539.661.454.000	129.063.402.000	843.683.977.000
2014	258.467.192.310	570.496.606.000	167.956.867.360	996.914.565.670
2015	276.845.601.830	578.590.036.000	118.021.321.350	1.066.745.516.010
2016	295.257.670.780	702.120.023.660	165.637.347.500	1.163.015.041.940
2017	359.024.019.506	699.677.068.681	157.503.597.436	1.216.204.685.623
2018	362.342.290.539	688.216.741.617	173.208.324.688	1.223.767.356.844
2019	330.946.584.148	709.268.996.970	196.692.221.743	1.236.907.802.861
2020	343.755.662.641	696.546.681.477	153.217.482.990	1.193.519.827.108
2021	344.401.029.350	860.294.504.597	39.409.328.056	1.244.104.862.003
2022	363.287.028.056	837.021.450.210	12.082.537.867	1.212.391.016.133

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, pendapatan atau penerimaan pemerintah Kota Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, fluktuasi dalam sektor ekonomi lokal, serta perubahan dalam tingkat pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun anggaran 2020, kinerja anggaran pemerintah Kota Sukabumi mengalami penurunan sebab munculnya Corona Virus Daerah 2019 (Covid-19) pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan pendapatan pemerintah Kota Sukabumi mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, kinerja anggaran mengalami kenaikan kembali sebab terdapat proyeksi target pembangunan Tahun 2021, serta pada tahun 2022 merupakan tahun dimana pasca/pemulihan pembangunan akibat covid terjadi, sehingga pendapatan daerah dapat kembali membaik dibandingkan pada tahun anggaran sebelumnya.

Namun apabila dilihat dalam kondisi keuangannya, pendapatan daerah pemerintah Kota Sukabumi ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kota Sukabumi merupakan salah satu kota yang pendapatannya didominasi oleh pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022, 2023) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah nya sendiri. Hal tersebut terjadi karena Kota Sukabumi merupakan kota dengan ekonomi lokal terbatas, artinya bahwa Kota Sukabumi memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya ekonomi yang dihasilkan di dalam wilayahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi ini hanya berasal dari pendapatan pajak daerah pada bidang jasa, seperti perhotelan dan restoran. Kemudian pendapatan lain yang dimiliki kota Sukabumi adalah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah seperti pelayanan kebersihan, parkir dan tempat umum lainnya (Hidayat, 2023). Dari adanya keterbatasan potensi yang dimiliki Kota Sukabumi, sehingga keterbatasan potensi tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi. Dalam teori keagenan, ketika agen (pemerintah) memiliki keterbatasan dalam sumber daya atau potensi pendapatan, maka dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan principal (masyarakat) dalam pengelolaan anggaran. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi fleksibilitas dalam alokasi anggaran dan keputusan pengelolaan dana publik.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Sukabumi berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, 2020). Namun

jika dilihat dari laporan realisasi anggaran nya, Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang diterima dengan kategori tinggi. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN/pusat yang diberikan dengan maksud untuk menyelaraskan kapasitas finansial antar-Daerah dalam rangka mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020, 2020). Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk menjaga keadilan antara pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang beragam, sehingga daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Bagi Hasil. Dana ini berasal dari pendapatan APBN/pusat yang diberikan kepada daerah-daerah berdasarkan persentase tertentu, yang bertujuan untuk membiayai keperluan daerah dalam kerangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020, 2020). Pendapatan transfer yang diterima dari dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022, 2023). Tujuan dari DBH adalah untuk memberikan pendapatan tambahan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atau penghargaan atas pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ada di daerah tersebut.

**Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Belanja Pegawai  
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022**

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Daerah	Persentase	30% Total Belanja APBD
2011	364.939.251.000	619.143.878.000	58,94%	185.743.163.400
2012	406.564.251.000	674.879.856.000	60,24%	202.463.956.800
2013	451.891.999.000	837.454.351.000	53,96%	251.236.305.300
2014	479.774.507.560	917.115.741.590	52,31%	275.134.722.477
2015	514.593.902.580	1.057.842.417.760	48,65%	317.352.725.328
2016	539.088.923.250	1.200.744.384.390	44,90%	360.223.315.317
2017	469.627.158.071	1.160.219.417.015	40,48%	348.065.825.105
2018	502.263.381.557	1.185.870.308.688	42,35%	355.761.092.606
2019	539.665.226.347	1.308.065.325.737	41,26%	392.419.597.721



2020	527.957.586.086	1.202.030.934.576	43,92%	360.609.280.373
2021	526.183.814.534	1.201.047.392.056	43,81%	360.314.217.617
2022	551.485.949.939	1.251.736.198.234	44,06%	375.520.859.470

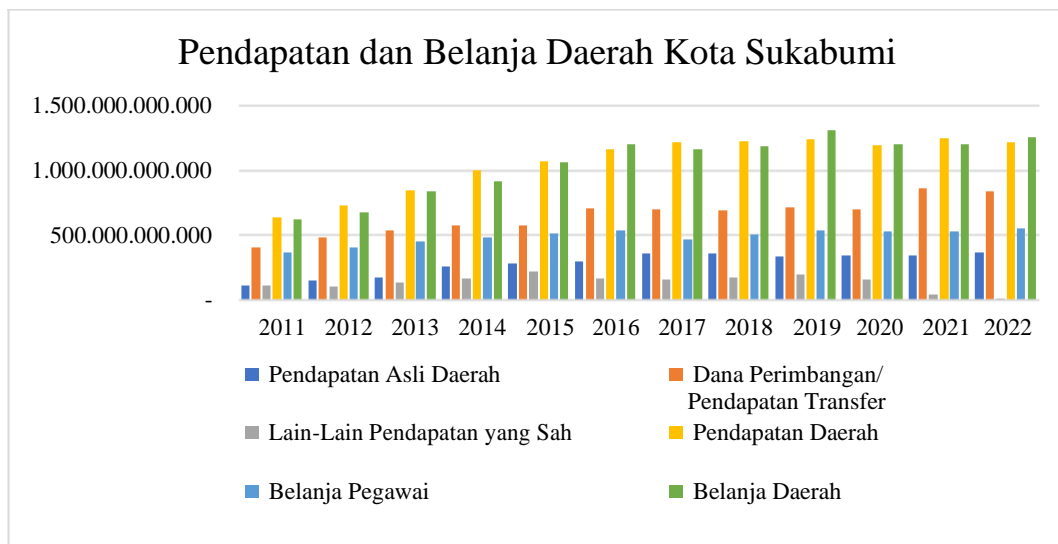
Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, belanja atau pembiayaan pada Pemerintah Kota Sukabumi mengalami fluktuasi. Fluktuasi belanja daerah merujuk pada perubahan yang tidak stabil dalam jumlah atau pola pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari periode ke periode. Fluktuasi belanja daerah dapat terjadi karena berbagai faktor dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pada visi dan misi Kota Sukabumi, menetapkan kebijakan sebagai skala prioritas dalam hal Pendidikan, sosial, dan infrastruktur Pemerintah Daerah. Namun pada tahun anggaran 2019, kinerja anggaran belanja daerah mengalami kenaikan, hal tersebut terjadi karena adanya dampak dari pandemic Covid 19 pada akhir tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 dan 2021 juga anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang sempat turun. Karena adanya dampak dari pandemic Covid-19 sehingga terdapat *refocusing* dan realokasi anggaran pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan terutama pada indikator makro ekonomi nasional untuk tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan tahun 2021.

Pada tahun 2021 juga, Pemerintah Kota Sukabumi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada Wali Kota, Achmad Fahmi, di hotel Bidakara Jakarta, pada hari Kamis, 2 Juni 2022 (Diskominfo: 2022). Selain itu juga, pemerintah Kota Sukabumi menerima kembali penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Terbaik I se-Indonesia dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diserahkan oleh Menteri PPN / Kepala Bappena, Suharso Monoarfa, kepada Wali Kota, Achmad Fahmi, di Kantor Bappenas pada 14 Juni 2023.

Namun jika dilihat dari kondisi keuangannya, Pemerintah Kota Sukabumi merupakan kota yang penyerapan anggarannya didominasi pada penyerapan

komposisi belanja barang dan jasa yang di dalam nya termuat belanja pegawai yang penyerapan nya masih termasuk dalam kategori tinggi yaitu di atas 30% dari total belanja APBD. Sebagaimana yang tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022) serta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022, 2023) menjelaskan bahwa belanja pegawai seharusnya diserap sebanyak maksimal 30% dari total belanja APBD. Berikut trend Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi:



**Gambar 1. 5 Trend Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi**

Dapat diketahui memang belanja pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi ini masih sangat mendominasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan yang bertindak atas nama pemilik (Masyarakat). Ketika belanja pegawai mendominasi anggaran pada Pemerintah Kota Sukabumi, sektor lain seperti Pendidikan, kesehatan, dan social dalam Pemerintah Daerah dapat bersaing dalam mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar selanjutnya untuk kepentingan mereka. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada pemerintah Kota Sukabumi masih sangat banyak.

Dari hal tersebut juga berdampak pada kebutuhan formasi pegawai yang dapat mempengaruhi pengadan. Sehingga pada lima tahun terakhir ini tidak adanya

program CPNS baru. Hal ini didukung dengan prinsip teori keagenan, yaitu pentingnya bagi agen (pemerintah) untuk memilih dan menempatkan pegawai yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat mengurangi potensi konflik kepentingan antara agen (pemerintah) dan principal (Masyarakat).

Penyerapan barang dan jasa lainnya seperti yang sifatnya pemeliharaan itu seperti pemeliharaan gedung/bangunan, dan yang lainnya juga sangat mendominasi dibandingkan dengan penyerapan belanja modal yang sifatnya mendukung atau memberikan pengaruh terhadap pelayanan dan/atau peningkatan status seperti pembuatan jalan, pembuatan gedung, dan yang lainnya. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan muncul ketika agen (pemerintah) dan principal (Masyarakat) memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda. Dominasi penyerapan anggaran untuk barang dan jasa yang termasuk belanja pegawai adalah kepentingan agen (pemerintah) dalam menjalankan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sebagai agen berusaha untuk memastikan kelancaran dan kualitas layanan publik yang ada dengan mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan biaya operasional yang terkait dengan tenaga kerja. Sementara itu, principal (masyarakat) memiliki kepentingan yang lebih luas dalam penggunaan dana public seperti dalam sektor Pendidikan, social, dan infrastruktur.

Dengan demikian, konflik kepentingan antara agen (pemerintah) dan principal (masyarakat) dalam alokasi anggaran mencerminkan perbedaan fokus antara menjaga operasional dan pelayanan yang berjalan dengan baik (agen) dan memastikan penggunaan dana publik yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam kepentingan publik (principal).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dwitya Pratiwi, 2018) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Namun, dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK), meskipun ada pengaruh positif, hasilnya tidak

mencapai tingkat signifikansi yang cukup untuk berpengaruh terhadap alokasi belanja pegawai.

Selain itu juga, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai. Secara individual, Pendapatan Asli Daerah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pegawai di Kota Bogor pada periode 2016-2020, demikian pula dengan dana perimbangan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pegawai di kota Bogor dalam rentang waktu yang sama.

Berdasarkan konteks persoalan dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai”** yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi karena sebagai eksekutor perencanaan pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Sukabumi, yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangannya. Sehingga mampu mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud transparansi pengelolaan dana publik oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pegawai?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Pegawai?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai?

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini mencakup pengamatan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam kerangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 12 (dua belas) periode anggaran, mulai dari tahun 2011-2022.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwa sasaran dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai?
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pegawai?
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai?



### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan utilitas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud dari sumber teks ataupun rujukan untuk penggunaannya khususnya kepada pihak-pihak yang hendak melaksanakan riset yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### 2. Manfaat Praktisi

##### a. Bagi Penulis



Guna mengembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yang terfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai bahan rujukan guna mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sesuatu keberhasilan serta terwujudnya otonomi daerah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membagikan data yang bernilai kepada publik mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah.



## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan hal yang akan diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan formulasi permasalahan batas permasalahan tujuan serta faedah riset dan sistematika penyusunan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan mengenai teori-teori penunjang, riset terpaut serta kerangka pemikiran.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini berisikan mengenai tahapan riset tempat serta waktu riset subjek serta objek riset metode pengumpulan informasi serta metodologi riset yang digunakan.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian serta ulasan yang telah dilaksanakan.

## BAB V : Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian serta masukan yang diharapkan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai dalam studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam rentang waktu Tahun Anggaran 2011-2022. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai karena Kota Sukabumi merupakan kota dengan ekonomi lokal terbatas, artinya bahwa Kota Sukabumi memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya ekonomi yang dihasilkan di dalam wilayahnya sendiri.
2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai karena Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kebijakan sesuai dengan visi dan misinya bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memiliki skala prioritas untuk meningkatkan kualitas Masyarakat dengan Pendidikan, Pembangunan infrastruktur, dan Kesehatan. Sehingga Dana Bagi Hasil ini tidak dialokasikan terhadap anggaran belanja pegawai.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai karena besaran Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kota Sukabumi dapat mempengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan termasuk belanja pegawai.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Karena ketika Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum dijumlahkan, maka total sumber daya keuangan yang tersedia pada Pemerintah Kota Sukabumi juga meningkat. Sehingga dapat merealisasikan alokasi anggaran operasional daerah seperti Belanja Pegawai.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan maksimalitas usaha dan komitmen untuk memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Namun, seperti halnya setiap penelitian, terdapat beberapa batasan yang perlu diakui:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber pada LRA dari laporan keuangan pemerintah daerah yang lainnya, seperti Laporan Pelaksanaan Anggaran (Basis Kas) berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Operasional, dll.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada variabel yang diteliti berdasarkan tingkat kemampuan keuangan daerah.
3. Penelitian ini dilakukan di satu pemerintah daerah tertentu, dan hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda.
4. Keterbatasan teori yang diterapkan. Teori-teori tersebut mungkin memiliki keterbatasan dalam menjelaskan semua aspek yang relevan dalam hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.



## 5.3 Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam konteks hasil penelitian ini:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan pendekatan yang lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih terperinci terhadap Belanja Pegawai.
2. Bagi Pemerintah Daerah:
  - a. Pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, diharapkan dapat memperhatikan sumber-sumber pendapatan dan mengelolanya secara efektif sehingga dapat membantu memperkuat ketahanan keuangan daerah.

- b. Kebijakan anggaran yang berkelanjutan, diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendukung alokasi dana secara bijaksana dan optimal sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dan pelayanan publik yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., Indriyani, H., & Fransisca, S. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI* Muhammad. April, 6–7.
- Ardhani, P. (2011). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*.
- Baldrick, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik ; Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- Dwitya Pratiwi, R. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Pegawai*.
- Erlina, Rasdianto, & Rambe, O. S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mulyowono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Ed. 8 (Ed. 8)*. Universitas Diponegoro , 2016.
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah E4 (4th ed.)*. Salemba Empat.
- Hidayat, A. (2023). *Realisasi Pajak Mengalami Peningkatan Selama Tahun 2022*. <https://portal.sukabumikota.go.id/21360/realisasi-pajak-mengalami-peningkatan-selama-tahun-2022/>
- Ichsan, R. (2013). *Teori Keagenan (Agency Theory)*. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP



STRUCTURE. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.

<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*. Umsu Press, 2014. [http://ikifa.ac.id:80/repository-digital/index.php?p=show\\_detail&id=2575](http://ikifa.ac.id:80/repository-digital/index.php?p=show_detail&id=2575)

Mahanani, S., & Maskudi. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 82–90.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. In Mardiasmo (Ed.), *Andi* (1st ed., Vol. 5, Issue 3). Penerbit Andi.

MELATI, M. (2014). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN STANDARISASI PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.  
 Nur Aini, F. (2017). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA PEGAWAI*. 44(8), 9–25.  
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–445).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022. (2023). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN* (pp. 1–206).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018. (2018). *Tentang Klasifikasi Anggaran*. 150.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. In *Kementerian Keuangan*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Jurnal Media Hukum* (p. 184).
- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021. (2021). *Berita daerah kota Sukabumi. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021* (pp. 1–5).
- Pinem, B. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota/Kota di Sumatera Utara*.  
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65111>
- Prasetya, I. (2017). *Pengaruh PAD, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.
- Prasetyo, A. H. (2014). *Terhadap Alokasi Belanja Pegawai*.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.
- R.A. Supriyono. (2018). *Akuntansi Keperilakuan Ekonomi & Bisnis* (3rd ed.).
- Ramadona, A. (2016). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *JOM*

- Fekon*, 3(1), 2357–2371.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11903>
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset* (Idris Gautama So (ed.); edt. 2). Salemba Empat, 2013.
- Subagjo. (2017). Bab II kajian teori. *BAB 2 Kajian Teori*, 1, 16–72.
- Sugiarto, 1964-, & Hongyanto, S. 1956-. (2020). *Statistika deskriptif & konsep peluang aplikasi R-Stat / Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc., Ir. Hongyanto Setio, MBA ; editor, Giovanny (G. (editor) (ed.))*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2020 ©2020 pada penulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono* (Cet. 1). Bandung : Alfabeta, 2018. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Subyek&bahan=Semua Jenis Bahan&katakunci=Metode penelitian>
- Trianda, R. (2017). *Pengaruh Pendanaan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara)*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/831>
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Rajawali Press, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757* (Issue 104172, pp. 1–143). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* (pp. 1–104).
- Yuwono, D. M., & RI, K. B. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) Triwulan IV 2022*. <https://www.bps.go.id/press-release/2023/02/06/348/berita-resmi-statistik.html>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.

## Lampiran 4: Curriculum Vitae

### CURRICULUM VITAE

Nama : Zahra Prathamy  
 NIM : 20190070066  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 10 Januari 2001  
 Agama : Islam  
 Pendidikan :  
     SD : SDN Cisaat  
     SLTP : SMPN 10 Kota Sukabumi  
     SLTA : SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi  
     Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Putra  
 Pekerjaan :  
     Finance, PT Warnasari Suka Tungki  
     Administrative officer, Produksi Beton Suka Tungki  
     Toko Mas Family, Toko Mas Family Sukabumi  
 Publikasi karya ilmiah :  
     - *Effect Receivable Turnover and Inventories Towards Liquidity of Cigarette Industries*  
     - *The Effect of Leverage, Liquidity and Capital Intensity on Accounting Conservatism at PT Gudang Garam Tbk*

